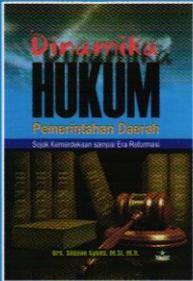




Drs. Sudono Syueb, M.Si, M.H., lahir di Lamongan, tanggal 4 April 1959, menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fisipol UGM Yogyakarta lulus tahun 1991, Pendidikan S-2 ditempuh Penulis pada Magister Ilmu Komunikasi di Unitomo Surabaya lulus tahun 2002, dan Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya lulus tahun 2008. Semasa menempuh pendidikan S-1 Penulis aktif di organisasi kemahasiswaan, yakni menjabat sebagai Wakil Ketua PII Yogyakarta dan HMI Komisariat Fisipol UGM. Berbekal pengalaman aktif di organisasi mahasiswa tersebut Penulis kemudian terjun ke organisasi politik hingga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur (2000-2005) dan Wakil Ketua DPW PAN Jatim (2005-2010). Riwayat pekerjaan ditekuni oleh Penulis di dunia pendidikan sebagai guru di MTs YTP Kertosono (1978-1980). Penulis kemudian mendirikan Yayasan Cakur Bakti, Blimbing, Lamongan (pengelola TK, SD, dan SMP Sultan Agung tahun 1987 - 1991). Sejak tahun 1992 - sekarang, Penulis menjadi Dosen di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Penulis juga pernah menekuni profesi sebagai peternak, dan saat ini sedang mengembangkan pupuk organik bokasi cair dan biogas dari kotoran ternak di daerah-daerah pertanian. Sejak tahun 2004-2009 Penulis dipercaya untuk menjadi wakil rakyat, yakni sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.



Di samping sebagai akademisi dan politisi, Penulis juga dikenal sebagai budayawan melalui karya-karya Cerpen dan Catatan Budaya yang telah dihasilkan. Penulis juga menjadi kolumnis yang cukup produktif melalui artikel-artikel yang dimuat di media cetak nasional dan lokal, seperti Kompas, Radar Surabaya, Mimbar Legislatif DPRD Jatim, dll. Buku yang sudah diterbitkan: (1) Tim Penulis Buku Berjudul "Islah" (2004, Sholahudin Press); (2) Paradoks Politik (2005, Java Pustaka); dan (3) Amin Rais dan Demokratisasi di Indonesia (2006).

Buku "Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia" ini memaparkan bahwa sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengalami pasang surut sejak kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Orde Lama penyelenggaraan pemerintahan daerah didominasi eksekutif (executive heavy) di bawah kontrol Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut terus berlanjut pada masa Orde Baru yang menjalankan pemerintahan secara sentralistik dan otoriter, yakni semua dikendalikan oleh Pusat. Sedang pada era reformasi pasca tumbangannya rezim Orde Baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, demokrasi, dan akuntabilitas melalui desentralisasi dengan memberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sasaran: buku ini sangat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, siswa, pejabat pemerintah dan praktisi pemerintahan di



Penerbit:

LAKSBANG MEDIATAMA

Jl. Plosokuning Raya
Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
E-mail: laksbang_media@yahoo.co.id